

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
DAERAH**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Disusun Oleh
Kuncoro Thesaurianto
C4B002235

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Agustus
2007

TESIS

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH**

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan



Oleh :

Kuncoro Thesaurianto
NIM : C4B002238

Telah disetujui
Oleh

Pembimbing Utama
Pendamping

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc
Mudakir, MT

Pembimbing

Drs. Y. Bagio

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

Oleh :

Kuncoro Thesaurianto
NIM : C4B002238

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 31 Agustus 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan dewan penguji

Pembimbing Utama
Pendamping

Pembimbing

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc
Mudakir, MT

Drs. Y. Bagio

Anggota penguji

Prof Dr. FX. Sugiyanto, MS

Telah dinyatakan lulus program studi
Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Pada tanggal 31 Agustus 2007

Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan disalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2007

Kuncoro Thesaurianto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami sehingga tugas penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dukungan data, pemikiran dan pemahaman serta bimbingan, sehingga tulisan ini dapat tersusun, terutama kepada :

**1. Bapak Dr Dwisetia Poerwono. MSc
selaku Pengelola Program Pascasarjana
Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro.**

2. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono. MSc dan Bapak Drs.Y.Bagio Mudakir, MT se selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyusunan tesis ini.

**3. Bapak dan ibu Dosen Program
Pascasarjana Fakultas Ekonomi yang**

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Diponegoro.

4. Bapak Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.
6. Bapak Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Bapak Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Bapak Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
11. Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan restu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Istri dan ananda tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan tesis ini.
13. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin

mengingat keterbatasan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sehubungan dengan hal tersebut, segala kritik dan saran terhadap tulisan ini dengan senang hati diterima demi penyempurnaan penulisan dikemudian hari.

ABSTRAKSI

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2002-2004).

Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis besarnya tingkat ketergantungan fiskal antara Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah. Kedua menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 1998 s/d 2005. Data ini dianalisis menggunakan metode regresi linier.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel transfer (X_1) menunjukkan t hitung sebesar 3,659, variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih (X_2) menunjukkan t hitung sebesar 3,595, variabel jumlah kendaraan roda 2 (X_3) menunjukkan t hitung sebesar 4,140 dan variabel investasi daerah (X_4) menunjukkan t hitung sebesar 4,595 dengan angka signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 23,468 ($23,468 > 9,12$) dengan angka signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah sebesar 96,9 persen

ABSTRACT

Economic Development is represent by the effort for the agenda of supporting execution the priority which written in Priority National Development, that is quickening cure of economics and strengthen the basis of continnous and fair economics development and with pursuant to nationality system. Stipulating of the priority base on challenge and problem faced and also policy instructing in short them development of economics as well as middle term (Propenas 2002 2004).

This research aim are to analyse the level of depended fiscal between Local Government Central Java Province) with Central Government seen from degree of fiscal decentralization and analysing influence of motor vehicle toward Local Government Original Receipt that represent the local potency in local fiscal enhancement. This research use secondary data (series times) of year 1998 to 2005. This data is analysed using linear regresi method.

According to calculation known that the output of regression variable transfer (X_1) showing t count equal to 3,659, variable of amount of four wheel vehicles or more (X_2) showing t count equal to 3,595, variable of amount of two wheel vehicles (X_3) showing t count equal to 4,140 and variable of Regionnal Investment (X_4) showing t count equal to 4,595 with signifikan number smaller than 0,05 hence can be concluded that free variable by parsial and isn't it have an effect on to variable earnings of area genuiness of Provinsi Central Java. F Value count equal to 24,468 ($24,468 > 9,12$) with number of signifkansi equal to 0,000 ($0,000 < 0,05$) so that can be concluded that independent variable doesn't have an effect on Local Government Original Receipt variable partially and thoroughly. F Value cunt equal to 24,468 ($24,468 > 9,12$) with number of significanci equal to 0,000 ($0,000 < 0,05$) so that can be concluded that all independent variable that is transfer, amount of four wheel vehicles or more, two vehoicles and regional investment having an effect on Local Government Original Receipt of central java. Local Government Original Receipt of Central Java can be explained by variation from fourth independent variable that is transfer, amount of four wheel vehicles or more, two wheel vwhicles and Regional Investment equal to 96,9 %.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
Bab II Tinjauan Pustaka	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pemikiran	52
2.4 Hipotesis	54
Bab III Metode Penelitian	55
3.1 Definisi Operasional	55
3.2 Sumber Data	57

	3.3 Metode Pengumpulan Data	58
	3.4 Metode Analisis Data.....	58
Bab IV	Gambaran Umum Obyek Penelitian	65
	4.1 Keadaan APBD	65
	4.2 PDRB Jawa Tengah	72
Bab V	Hasil Data dan Pembahasan	74
	5.1 Deskripsi Objek Penelitian	74
	5.2 Pengujian Hipotesis	76
	5.3 Pengujian Simultan	79
	5.4 Koefisien Diterminasi	80
	5.5 Analisis Regresi Berganda	81
	5.6 Pembahasan.....	83
Bab V	Penutup	86
	6.1 Kesimpulan	86
	6.2 Saran	88
	6.3 Keterbatasan Penelitian	89

Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah

Lampiran 2 Analisa Regresi

Lampiran 3 Chart

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 6	Realisasi Penerimaan APBD.....
Tabel 2.1 11	Daftar Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabel 2.2 19	Perbandingan Anggaran Tradisional
Tabel 2.3 41	Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
Tabel 2.4 42	Daftar Pertumbuhan
Tabel 2.3 46	Daftar Transfer Pemerintah Pusat
Tabel 4.1 67	Pertumbuhan APBD.....
Tabel 4.2 68	Kontribusi PAD
Tabel 4.3 69	Kontribusi Tranfer Pemerintah
Tabel 4.4 77	Kontribusi PKB
Tabel 4.5 72	Kontribusi Penyertaan Modal
Tabel 4.6 73	PDRB
Tabel 5.1 75	Potensi PAD.....
Tabel 5.2 76	Hasil Estimasi

Tabel 5.3	Koefisien Diterminasi
80	
Tabel 5.4	Hasil Regresi
81	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	5
.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional menurut Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta nasional serta mertipakan konsekuensi dan kornitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selarna lima tahun ke depan. (Propenas 2000-2004)

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2002-2004).

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang disebabkan pendapatan pernerintah berkurang, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Krisis ekonomi telah berhasil memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan

ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejala sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada

kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah

Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan. Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa daerah provinsi perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (UU Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali

sumber-sumber PAD (Radianto, 1997,42 ; A Halim , 2001,348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Selama ini sumber dana PAD di empat provinsi di Pulau Jawa mencerminkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

Tabel berikut ini adalah struktur penerimaan pemerintah daerah dari empat provinsi di Puala Jawa.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Daerah
Propinsi Besar di Pulau Jawa Menurut Jenis Penerimaan
Tahun 1999/2000/2001 (Dalam Jutaan)

TAHUN	DKI JAKARTA				JAWA BARAT				JAWA TENGAH				JAWA TIMUR			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1999	822,836.69	1,692,889.38	1,662,787.12	4,178,513.19	38,548.98	443,375.70	593,452.88	1,075,377.56	49,148.85	318,566.66	518,595.80	886,311.32	79,019.86	539,966.85	352,927.10	971,913.81
	19.69%	40.51%	39.79%	100.00%	3.58%	41.23%	55.19%	100.00%	5.55%	35.94%	58.51%	100.00%	8.13%	55.56%	36.31%	100.00%
2000	879,326.70	2,439,285.10	1,515,011.45	4,833,623.25	157,547.25	694,621.78	591,611.30	1,443,780.32	86,297.54	474,210.35	521,123.56	1,081,631.45	144,542.26	787,064.82	364,661.40	1,296,268.48
	18.19%	50.46%	31.34%	100.00%	10.91%	48.11%	40.98%	100.00%	7.98%	43.84%	48.18%	100%	11.15%	60.72%	28.13%	100.00%
2001	1,767,116.75	4,209,150.89	3,684,456.14	9,660,723.79	284,676.54	1,211,417.72	911,603.00	2,407,697.26	227,875.06	830,974.16	875,304.12	1,934,153.34	462,451.75	1,310,532.76	842,330.09	2,615,314.61
	18.29%	43.57%	38.14%	100.00%	11.82%	50.31%	37.86%	100.00%	11.78%	42.96%	45.26%	100.00%	17.68%	50.11%	32.21%	100.00%
2002	2,239,022.97	5,625,059.63	3,282,042.44	11,146,125.03	132,063.44	1,184,619.51	935,070.24	2,251,753.19	429,091.82	1,241,644.89	719,025.09	2,389,761.79	367,746.94	1,336,314.00	879,373.70	2,583,434.64
	20.09%	50.47%	29.45%	100.00%	5.86%	52.61%	41.53%	100.00%	17.96%	51.96%	30.09%	100.00%	14.23%	51.73%	34.04%	100.00%
2003	512,682.22	5,761,851.41	3,707,637.94	9,982,171.57	88,391.20	2,082,202.44	1,093,891.31	3,264,484.95	447,814.57	1,467,004.57	985,407.97	2,900,227.11	200,539.65	2,196,865.64	780,561.19	3,177,966.48
	5.14%	57.72%	37.14%	100.00%	2.71%	63.78%	33.51%	100.00%	15.44%	50.58%	33.98%	100.00%	6.31%	69.13%	24.56%	100.00%

A : SILPA

B : PAD

C : PENERIMAAN DARI PUSAT DAN PINJAMAN DAERAH

D :

TOTAL

PENDAPATAN

Dengan melihat realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan seperti diatas, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ketahun pada tahun 1999/2000 PAD nya sebesar Rp 318,566.664 atau 35,94% dari total penerimaan sebesar Rp 886.311.318, tahun 2000 PADnya sebesar 474.210.349 atau 43,84% dari total penerimaan sebesar Rp 1.081.631.445, pada tahun 2001 PADnya sebesar Rp 830.974.156 atau 42,96% dari total penerimaan sebesar Rp 1.934.153.332 serta pada tahun 2002 PAD nya sebesar Rp. 909.568.468 atau 47% dari total penerimaan sebesar Rp 1.935.336.136.

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Hal ini menimbulkan keresahan di daerah, karena rakyat khawatir akan membayar pajak lebih banyak dibanding sebelum adanya otonomi daerah.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa dengan Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah daerah saling berlomba dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan

daerah terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (FX. Sugiyanto, 2000: 4).

1.2. Perumusan masalah

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah harus mampu meningkatkan PADnya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Penerimaan yang berasal dari PAD provinsi Jawa Tengah jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga untuk membiayai kebutuhan daerahnya , Provinsi Jawa Tengah masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, PAD Provinsi Jawa Tengah masih rendah dan selama daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Sejauhmana kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan PAD Pro⁹ Jawa Tengah.

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan potensi penerimaan PAD.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan guna peningkatan PAD.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Otonomi Daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berikut ini daftar investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005

Tabel 2.1
Daftar Pendapatan dan Belanja Daerah

TH	PENDAPATAN	BELANJA	INVESTASI	PAD
1998	684.693.138.800	635.544.286.412	171.626.292.744	238.874.98.368
1999	946.237.558.845	856.417.023.049	174.030.719.744	318.566.664.137
2000	1.081.631.444.952	857.278.417.439	180.090.719.744	474.210.348.836
2001	1.934.153.330.981	1.508.024.897.186	195.090.719.744	830.974.154.504
2002	2.389.761.795.410	2.133.152.473.344	205.677.956.000	1.241.644.887.324
2003	2.452.412.559.385	2.615.886.015.834	241.225.529.000	1.467.004.576.815
2004	2.883.599.878.228	2.572.554.358.908	517.360.895.111	1.865.391.191.285
2005	3.526.839.400.159	2.936.310.814.679	903.490.336.623	2.490.643.743.644

Sumber Data : APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 1998 s/d 2005

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya menginvestasikan sebagian dari PADnya untuk menambah penerimaan dari usaha daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara regional maupun nasional, sebagai langkah awal perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan melakukan perubahan yang struktural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar. Untuk mendukung perubahan struktural dari ekonomi tradisional yang subsistem menuju ekonomi moderen diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Sumodiningrat, 1999) :

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang paling mendasar adalah akses pada dana.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi.
- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit

kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*) sebagai unit pelaksana.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (*public money*) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep *value for money*), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*.

2.1.2.1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistik; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* ini,

seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):

- a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
- b. Pendekatan *incremental* menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
- c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
- d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, *overlapping*, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
- e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
- f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).

- g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya *budget padding* atau *budgetary slack*.
- h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan 'manipulasi anggaran.'
- i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

Beberapa kelemahan anggaran tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan pelaksanaan anggaran, bukan bentuk anggaran tradisional.

2.1.2.2. Era *New Public Management* (NPM)

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- Komprehensif/komparatif
- Terintegrasi dan lintas departemen

- Proses pengambilan keputusan yang rasional
- Berjangka panjang
- Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
- Analisis total *cost* dan *benefit* (termasuk *opportunity cost*)
- Berorientasi input, output, dan outcome (*value for money*), bukan sekedar input.
- Adanya pengawasan kinerja.

Tabel 2.2. Menyajikan perbedaan mendasar antara anggaran tradisional dengan anggaran era *new public management*.

Tabel 2..2
Perbandingan Anggaran Tradisional VS Anggaran
Dengan Pendekatan NPM

ANGGARAN TRADISIONAL	<i>NEW PUBLIC MANAGEMENT</i>
Sentralistis	Desentralisasi & <i>devolved management</i>
Berorientasi pada input	Berorientasi pada input, output, dan outcome (<i>value for money</i>)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
<i>Line-item</i> dan <i>incrementalism</i>	Berdasarkan sasaran dan target kinerja
Batasan departemen yang kaku (<i>rigid department</i>)	Lintas departemen (<i>cross department</i>)
Menggunakan aturan klasik: <i>Vote accounting</i>	<i>Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System</i>
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan	<i>Bottom-up budgeting</i>

Sumber Data : Artikel OTDA – Th. I – 4 – Juni 2002

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi

kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

- Akuntabilitas;
- *Value for Money*;
- Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity);
- Transparansi; dan

- Pengendalian.

a). Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

b). *Value for Money*

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan

sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c). Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik

(Probity)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d). Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e). Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu

dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
 - a. Mengetahui kebijakan pemerintah.
 - b. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
 - c. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for*
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

2.1.3. Otonomi Daerah dan Sistem Desentralisasi

Otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat (Yuliati, 2000) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga yaitu :

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability* artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi pembangunan daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor – faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar – benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan. Kemudian bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Uraian diatas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing – masing daerah yang akan menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintah daerah.

Sedangkan desentralisasi menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam – macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut Dennis Rodinelli dkk. (Didit Pontjowinoto, 1991) keberhasilan kebijakan desentralisasi pada negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor politik, ekonomi dan budaya seperti :

- a. Sampai berapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab.
- b. Sampai berapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
- c. Kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
- d. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber daya keuangan, manusia dan prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab.

Keempat faktor tersebut mempunyai derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Atas desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat untuk mengatasi sendiri tantangan pembangunan yang semakin kompleks, timbul kesadaran baru bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus lebih demokratis, mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah. Secara konseptual hal itu tercermin dari kemauan pusat untuk menempatkan daerah kabupaten dan kota dengan kewenang yang luas (Turtiantoro, 2000).

2.1.4. Desentralisasi Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal

dengan berbagai proxy sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rouhaty Nur Hikmah (Sukanto Reksohadiprojo, 1999) sebagaimana berikut :

- (a)
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$
- (b)
$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$
- (c)
$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Dimana : $TPD = PAD + BHPBP + SB$, kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka kriteria derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 0,00% s/d 10% : sangat kurang
- 2) 10,1% s/d 20% : kurang
- 3) 20,1% s/d 30% : cukup.
- 4) 30,1% s/d 40% : baik
- 5) 40,1% s/d 50% : sangat baik
- 6) > 50% : memuaskan

Menurut Abdul Halim (2004) desentralisasi fiskal memiliki berbagai keuntungan, yakni (1) meningkatnya demokrasi akar rumput (2) perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia, (3) meningkatkan efisiensi melalui pendelegasian kewenangan, (4) meningkatkan kualitas pelayanan dan (5) meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Kemandirian Fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain – lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber – sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Elia Radianto,1997).

Kemudian untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran Derajat Kemandirian Fiskal Daerah / Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DKFD / DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Elia Radianto,1997).

Sementara itu Machfud Sidik (2004) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki peran yang strategis sebagai salah satu piranti kebijakan fiskal pemerintah, yang ditujukan untuk (1) menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan dalam konteks kebijakan ekonomi makro, (2) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (3) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan, (4) meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (otonomi fiskal). Pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997, 42).

Menurut Radianto, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PADnya. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama.

Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 1997, 408).

Menurut Sugiyanto (2000, 2), ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD terhadap pengeluaran pemerintah kota/kabupaten. Rumusan perhitungannya adalah R/E ($R = \text{PAD}$ dan $E = \text{anggaran pengeluaran}$). Apabila rasio tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

2.1.5. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat (Abdul Halim, 2004)

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (Kaho, 1997, 61; Suparmoko, 2002, 16). Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan di dalam APBD terdiri dari lima komponen besar, yaitu : PAD; bagi hasil pajak dan bukan pajak; sumbangan/bantuan pemerintah pusat; pinjaman daerah; dan sisa lebih tahun sebelumnya. PAD terdiri dari : Penerimaan pajak daerah; retribusi daerah; bagian laba dari perusahaan atau BUMD; dan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup : penerimaan dari hasil penjualan barang bekas dan sisa; bunga simpanan di bank; dan sebagainya (Nazara, 1997,20). Menurut pasal 79 UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :

- 1) hasil pajak daerah;
- 2) hasil retribusi daerah;
- 3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Dana perimbangan;

3. Pinjaman daerah; dan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan menurut Davey (1988), sumber pendapatan pemerintah regional adalah:

1. Alokasi dari pemerintah pusat:

- 1) anggaran pusat (votes)

2) bantuan pusat (grants)

3) bagi-hasil pajak

4) pinjaman

5) penyertaan modal

2. Perpajakan

3. Retribusi (charging)

4. Pinjaman

5. Perusahaan (badan usaha).

2.1.6. Pajak

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah berupa pungutan yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan kepada subyeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukkan (Guritno, 2001, 181). Hal terpenting Menurut Guritno, belum tentu si pembayar pajak adalah pihak yang akhirnya menderita beban pajak tersebut. Karena ada kemungkinan pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada Pihak lain. Sedangkan pihak yang menderita karena membayar pajak disebut tax impact. Hal-hal semacam ini disebut teori insidens pajak (*tax incidence theory*) yang umum dibagi dalam tiga konsep beban pajak yaitu:

1. Absolut, analisisnya hanya manfaat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif jenis pajak lainnya atau akibat suatu program pemerintah.

2. Anggaran berimbang, menganalisis pengaruh distributif pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak dalam jumlah yang sama.
3. Diferensial, menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak terhadap suatu program pemerintah dalam jumlah yang sama.

Dari sudut pandang ekonomi publik, difinisi ekonomi (*direct tax* maupun *indirect tax*) tersebut kurang tepat karena terjadinya pergeseran suatu pajak tergantung pada 4 faktor-faktor ekonomi, yaitu : elastisitas penawaran; elastisitas permintaan; bentuk pembayaran dan motivasi pengusaha.

Hukum pajak, sebagai bagian dari hukum publik, diatur secara khusus dengan menganut paham *imperialif* yang artinya bahwa pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Sebagaimana fungsi pajak dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, maka hukum pajak dibagi dua macam:

1. Materiil, bermuatan norma-norma antara lain keadaan, perbuatan, obyek, subyek, tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Formil, memuat tata cara dalam norma materiil yang mencakup : prosedur, hak-hak dan kewajiban wajib pajak.

Dalam kapasitasnya sebagai sumber dana dalam negeri, pajak memiliki 2 fungsi:

1. Budgetair yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara; dan
2. Mengatur yaitu untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya untuk barang-barang konsumsi yang mengganggu kesehatan, gaya hidup konsumtif, bea masuk untuk proteksi produk-produk

lokal, dan lain-lain. Beberapa teori yang memberikan hak kepada negara untuk pemungutan pajak antara lain:

1. Teori asuransi, yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat, sehingga pajak diibaratkan sebagai premi asuransi,
2. Teori kepentingan, pembebanannya didasarkan pada kepentingan masing-masing individu yang hubungannya searah.
3. Teori daya pikul, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap individu baik secara obyektif (penghasilan/kekayaan) maupun subyektif (kebutuhan yang harus dipenuhi).
4. Teori bakti, mendasarkan pada kesadaran rakyat akan kewajiban membayar pajak.
5. Teori asas daya beli, yaitu dampak terhadap pemungutannya. Pajak dari rakyat ke negara dan dikembalikan lagi dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Menurut A. Smith (Guritno, 2001) dan para ahli keuangan negara lainnya, sistem pajak yang baik harus memenuhi kriteria :

1. Distribusi beban pajak yang adil, sesuai dengan bagian yang wajar.
2. Sedikit mungkin mencampuri mekanisme pasar.
3. Mampu memperbaiki inefisiensi sektor swasta.
4. Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal.
5. Sistemnya harus dimengerti oleh wajib pajak
6. Administrasi dan biaya pelaksanaannya harus minimal.

7. Bersifat pasti, dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Simanjuntak, 2001,98).

Menurut Davey (1988,39), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
2. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Penilaian potensi pajak sebagai penerimaan daerah, ada 5 (lima) kriteria yaitu:

- 1 Kecukupan dan elastisitas, ini menyangkut apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
2. Keadilan, prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan ini mempunyai tiga dimensi yaitu : pemerataan secara vertikal; horisontal; dan keadilan secara geografis.

3. Kemampuan administratif yang berkaitan dengan perbedaan jumlah pendapatan, integritasnya, dan keputusan yang diperlukan.
4. Kesepakatan politis, menyangkut sensitivitas dalam pengenaan pajak, Struktur tarif siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi.
5. Kecocokan, apakah sebagai pajak pusat atau pajak daerah.

Sedangkan menurut Davey (1989, 61-62), tolok ukuran untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada menggunakan serangkaian ukuran :

1. Hasil (*yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal; artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, artinya hendaknya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak harus dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) : artinya harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Seiring dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan toleransi masyarakat dalam membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Tingkat toleransi tersebut merupakan kendala bagi pemerintah untuk menarik pungutan pajak. Dalam teorinya, Peacock dan Wiseman (Guritno, 2001, 173) mengatakan bahwa "perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga semakin besar, begitu pula pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar".

Sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah-jenis pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Berikut ini digambarkan tabel 2.3 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada di Jawa Tengah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.3.
Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
Tahun 1998 Sampai Dengan Tahun 2005

No	Tahun	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Jumlah Kendaraan
1	1998	1.699.238	376.108	2.075.346
2	1999	1.810.965	394.909	2.205.874
3	2000	1.956.470	424.038	2.380.508
4	2001	2.173.680	448.524	2.622.204
5	2002	2.460.900	473.512	2.934.412
6	2003	2.735.054	496.801	3.231.855
7	204	3.173.230	537.344	3.710.574
8	2005	3.654.103	587.458	4.241.561

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah baik roda 2 maupun roda 4 setiap tahun selalu bertambah cukup besar, sehingga peningkatan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor juga meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.

**Daftar Pertumbuhan
Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4
di Jawa Tengah Tahun 1998 Sampai Dengan Tahun 2005**

No	Tahun	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Jumlah Kendaraan
1	1998	25.781	15.671	41.452
2	1999	111.727	18.801	130.528
3	2000	145.505	29.129	174.634
4	2001	217.210	24.486	241.696
5	2002	287.220	24.988	312.208
6	2003	274.154	23.289	297.443
7	2004	436.176	40.543	478.719
8	2005	480.873	50.114	530.987

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dilihat dari daftar diatas, pada tahun 1999 jumlah kendaraan roda 2 mengalami pertumbuhan yang fantastik yaitu sebesar 433,36 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masuknya kendaraan roda 2 buatan China yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan kendaraan roda 2 buatan Jepang. Sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan kendaran di Jawa Tengah sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu untuk kendaraan roda 2 hanya mencapai 95,52 % dan roda 4 sebesar 93,20 %.

2.1.7. Retribusi

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU nomor 34 tahun 2000 jo. UU nomor 18 tahun 1997). Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha, dan
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

Menurut Davey (1988, 30), retribusi adalah suatu pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dari pemerintah. Pembayaran tersebut biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Sedangkan menurut Davey (1989, 95), kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada Pengertian efisiensi ekonominya. Menurutnya, seseorang bebas untuk menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam teori ekonominya, harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost) yaitu biaya untuk melayani konsumen terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah merupakan hak monopoli, maka manfaat ekonominya tertinggi untuk masyarakat adalah jika penetapan harga layanan tersebut diumpamakan adanya suatu persaingan pasar. Dengan demikian pemerintah akan memproduksi jasa tersebut pada titik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (marginal revenue).

2.1.8. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi kesiapan sumberdaya manusia maupun perangkat pendukungnya, sementara yang lain berpandangan bahwa saat pemerintah daerah bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Ekses lain adalah keterbukaan atas informasi yang semakin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diamati oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Abdul Halim, 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang publik yang pembiayaannya melalui berbagai sumber, khususnya pajak. Dengan kondisi kemampuan keuangan antar daerah berbeda, maka adanya sistem keuangan negara yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh.

Alokasi tugas tersebut membawa konsekuensi pada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan kenyataan pada derajat otonomi yang tinggi (Suparmoko, 2002, 37-38).

Berhubungan dengan pembiayaan pemerintahan di daerah, maka perlu diketahui pendapatan yang pasti agar ada kepastian mengenai pelaksanaan dan keinginan kegiatan pemerintahan di daerah. Perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup

pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah akan memperoleh alokasi dana besar sebagai konsekuensi otonomi daerah. Tugas-tugas yang selama ini secara sentralistik menjadi tugas pemerintah pusat kini menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut. Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan.

Menurut UU No. 25 tahun 1999 pasal 6 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari : (1) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari Sumber Daya Alam; (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Tabel berikut ini digambarkan subsidi dari pemerintah pusat yang dialokasikan pada Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2005.

Tabel 2.5
Daftar Transfer Pemerintah Pusat Kepada Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1998 S/D 2005

Tahun	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Penerimaan lainnya/ Dana Penyeimbang	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat
1998	43.204.292.598	242.720.356.100	128.160.170.777	414.084.819.475
1999	49.869.652.248	317.350.404.720	211.301.985.352	578.522.042.320
2000	55.243.007.613	288.587.832.182	177.292.720.525	521.123.560.320
2001	119.962.361.541	647.752.325.923	107.589.426.000	875.304.113.464
2002	158.395.089.635	560.630.000.000	0	719.025.089.635
2003	166.830.000.000	509.870.000.000	271.766.750.000	948.466.750.000
2004	236.012.686.943	553.064.000.000	229.132.000.000	1.018.208.686.943
2005	257.176.657.515	549.956.000.000	229.063.000.000	1.036.195.657.515

Sumber Data : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 s/d 2005 diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun bantuan pemerintah pusat jumlahnya semakin meningkat, hal ini disebabkan karena kebutuhan daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya juga semakin besar untuk tiap tahunnya. Hanya pada tahun 2000 dan 2002 jumlah penerimaan dari pemerintah pusat yang peningkatannya negatif dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada tahun 2000 pemerintah mengambil kebijakan untuk merubah tahun anggaran menjadi tahun takwim, sehingga pada tahun anggaran yang sebelumnya dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, maka tahun anggaran 2000 dimulai pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember tahun 2000, jadi tahun anggaran 2000 hanya memiliki waktu hanya 8

bulan. Sedangkan tahun 2002 penerimaan dari pemerintah pusat lebih rendah dari tahun 2001 karena pada tahun 2002 ada kebijakan bahwa sisa DAU pada tahun sebelumnya diperhitungkan dengan alokasi DAU tahun berkenaan. Pada tahun 2001 penerimaan DAU Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2000 ataupun dari tahun 1999 atau penerimaan DAU tahun 2001 peningkatannya mencapai 204,11% dibandingkan penerimaan tahun 1999 dan 224,45% dibandingkan dengan penerimaan DAU tahun 2000. Hal ini berkaitan dengan dimulainya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa otonomi daerah dimulai tanggal 1 Januari 2001.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain :

1. Andi Kusuma Negara (1998), melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, analisis perkembangan PADS, dan evaluasi derajat sentralisasi. Rumus yang dipakai : $(PADS_t / PD_t) * 100\%$, dimana $PADS_t$ = pendapatan asli daerah sendiri pada tahun t, PD_t = penerimaan daerah pada tahun t. Kesimpulannya PADS Kabupaten Dati II Kudus relatif kecil (rata – rata 29,52%) terhadap total penerimaan daerah.
2. Richard Tumilaar (1997), dalam tesisnya menganalisis derajat otonomi fiskal di Propinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat bantuan pemerintah pusat. Sementara tingkat ekonomi dan transfer menunjukkan pengaruh yang bervariasi pada

masing-masing daerah. Tetapi yang terpenting adalah aspek ekonomi dan keuangan adalah yang paling besar pengaruhnya untuk mengukur derajat otonomi fiskal. Penelitian memakai metode OLS dengan model koreksi kesalahan (*Engle Granger ECM*) dengan data runtut waktu tahun 1979-1993. Variabel yang digunakan adalah : derajat otonomi fiskal (Y); perkembangan ekonomi daerah (X_1); bantuan pemerintah pusat (X_2); dan transfer (X_3).

3. Yuliati (2001) pada penelitiannya tentang kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyebutkan bahwa untuk mencapai kemandirian dengan mengandalkan PAD + bagi hasil, efeknya relatif lebih cepat daripada hanya mengandalkan PAD saja. Sementara penghitungan rasio PAD terhadap PDRB dengan menggunakan harga berlaku, menunjukkan hasil yang kurang baik.

Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (1995/1996-1999/2000), dengan pengelompokan beberapa alat analisis, yaitu :

- Derajat desentralisasi fiskal, yaitu : rasio PAD dengan total pendapatan; rasio PAD + bagi hasil dengan total pendapatan; rasio PAD dengan pengeluaran rutin; dan rasio PAD + bagi hasil dengan pengeluaran rutin.
- Kebutuhan fiskal, dihitung dari total antara pengeluaran daerah dibagi jumlah penduduk, kemudian dibagi dengan jumlah kabupaten/kota.
- Kapasitas fiskal diperoleh dari jumlah antara PDRB dibagi jumlah penduduk, lalu dibagi dengan jumlah kabupaten/kota.

- Upaya fiskal, dihitung dengan mencari koefisien elastisitas pertumbuhan rata-rata PAD terhadap PDRB (harga konstan dan berlaku).
3. Elia Radianto (1997), dalam penelitiannya tentang Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II di Maluku, menyimpulkan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi (PE) dan bantuan pemerintah pusat (G), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal daerah (Y). Menggunakan alat analisis linear dinamis yaitu *Partial Adjustment Model* (PAM) dengan data kurun waktu tahun 1986/1987-1994/1995.
 4. Kerjasama LP2I Semarang dengan pemerintah Propinsi Jawa Tengah (2000) tentang penggalan sumber-sumber pendapatan baru di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa kondisi geografis, pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000, merupakan peluang utama dalam penelitian tersebut. Variabel lainnya adalah kondisi demografi, sosial budaya, serta kondisi pemerintahan.

Kontribusi terbesar pada PAD adalah retribusi yang diikuti pajak, sumber lain, dinas, dan BUMD. Namun secara keseluruhan masih lebih baik daripada kondisi yang ada di 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT dari hasil diskusi kelompok dengan beberapa instansi terkait serta para pakar di bidang keuangan publik yang dilanjutkan dengan analisis diskriptif.

5. Abdul Halim (2001) dalam penelitiannya tentang *fiscal stress*, disebutkan bahwa PAD masih berperan terhadap total penerimaan daerah/propinsi. Retribusi sebagai komponen utama PAD, berpengaruh secara signifikan daripada pajak. Sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak berpengaruh terhadap PAD. Analisis berdasarkan data realisasi anggaran propinsi sebelum *fiscal stress* (1996/1997) dan sesudahnya (1998/1999). Selanjutnya dilakukan pengujian dengan *Paired Sample T Test*, yaitu membandingkan dua sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Penelitian tersebut hanya terfokus pada angka rata-rata seluruh propinsi di Indonesia.
6. Rita Engleni (2001) yang meneliti tentang PAD di Kota Padang menyimpulkan perlunya rencana penerimaan PAD jangka menengah yang memenuhi unsur rasionalitas dan berorientasi ke depan. Skenario ini merupakan langkah penting sebagai respon semangat kemandirian pendanaan daerah. Disamping sebagai pedoman penentuan langkah dan tindakan oleh dinas/unit kerja pengelola penerimaan PAD, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yang dikaitkan dengan beberapa indikator pokok yaitu rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebagai dasar untuk memprediksi rumusannya.
7. Susiyati (1987) menelaah keuangan di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi pemerintah daerah selama ini yaitu:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
 - b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
 - c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya karena kurangnya pengertian mereka tentang fungsi perpajakan tersebut.
8. Booth (1988) yang membahas pendanaan pemerintah pusat dalam pengeluaran pembangunan pemerintah daerah, mengatakan bahwa kelemahan sistem dana yang dikembangkan sejak tahun 1970-an adalah ketergantungan daerah pada pusat sehingga tidak ada keinginan atau inisiatif untuk meningkatkan sumberdaya sendiri dalam membiayai proyek-proyeknya. Dengan kata lain, pola alokasi bantuan tersebut hanya sedikit menyediakan inisiatif daerah dalam memobilisasi sumber-sumber daya lokal.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah pada era otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2001 dapat memberdayakan daerah untuk

mengembangkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh daerah tetapi masih dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah guna menunjang PAD, dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sebagai upaya peningkatan PAD perlu diambil langkah kebijakan efisiensi didalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ada saving yang dapat dimanfaatkan untuk investasi daerah yang dialokasikan pada badan usaha baik milik daerah sendiri maupun swasta yang mau diajak bekerjasama agar mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah selain dari sektor pajak pajak dan retribusi daerah serta dari transfer pemerintah pusat melalui pengalokasian DAU atau dana perimbangan.

Melalui tabel 1 dimuka, diketahui bahwa pajak dan retribusi merupakan komponen terbesar dalam peningkatan penerimaan PAD. Penerimaan dari hasil usaha daerah belum begitu signifikan, tetapi segi belanja setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengalokasikan belanja penyertaan modal untuk menunjang peningkatan PAD, dan bila dibandingkan dengan PAD Provinsi DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur, PAD Jawa Tengah masih lebih rendah.

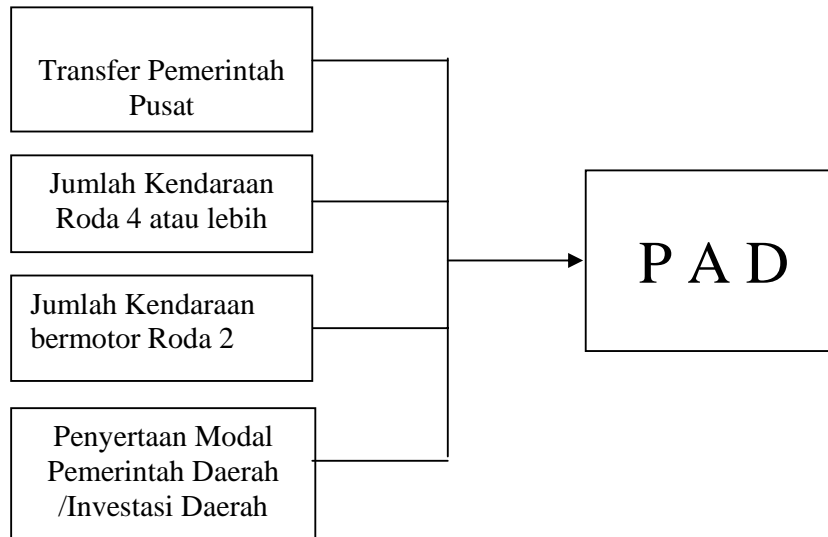
Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa modal usaha yang di investasikan pada BUMD selalu meningkat seiring dengan peningkatan PAD setiap tahunnya.

Dengan melakukan penghitungan rasio terhadap masing-masing komponen penerimaa, maka akan dapat diketahui tingkat kemampuan masing-masing komponen penerimaan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk memastikan apakah DAU yang selama ini diterima oleh daerah memang signifikan/dipengaruhi oleh variabel-variabel dalam penelitian, maka perlu dilakukan analisis realokasi anggaran. Adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu :

1. Kebutuhan daerah, yang diwakill oleh jumlah penduduk daerah yang bersangkutan (Lains, 1985, 53), Semakin banyak penduduk suatu daerah, makin besar pula jumlah dana yang diterima untuk pembiayaan terhadap jasa-jasa lokal dan jasa teknis yang diperlukan penduduk setempat. Hal ini dapat digambarkan pada alokasi transfer dari pemerintah pusat yang diterima dengan total belanja daerah dalam APBD.
2. Berapa besar penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang dalam tabel merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan.
3. Seberapa besar pengaruh diinvestasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menunjang peningkatan PAD, serta sektor lain yang mungkin berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teoritis, dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada pengaruh Transfer pemerintah pusat terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga ada pengaruh jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah
3. Diduga ada pengaruh jumlah kendaraan bermotor roda 2 terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah
4. Diduga ada pengaruh Investasi Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah

BAB. III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi operasional

Variabel Dependen dalam penelitian ini yang masuk dalam variabel dependen adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber – sumber keuangan untuk membiayai tugas – tugas dan tanggung jawabnya (Sutrisno PH, 1982).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dapat pula mempengaruhi produksi nasional, pendapatan asli daerah diperoleh dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba dari BUMD (Hasil Investasi)

Variabel pendapatan asli daerah dinotasikan dengan simbol (Y).

Variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah, sumbangan pihak ketiga dan hasil usaha daerah serta penerimaan lainnya yang menjadi hak daerah dan merupakan potensi daerah.
2. Transfer dari pemerintah pusat yaitu penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat guna pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagai tangan panjang dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta penerimaan lainnya yang sah (Dana Penyeimbang). Transfer dari pemerintah pusat atau disebut juga dengan perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yaitu jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang domisili pemiliknya berada di wilayah otonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pajak atas kepemilikan kendaraan roda 4 atau lebih yang dipungut oleh pemerintah daerah dan masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar

kendaraan bermotor dan sumbangan pihak ketiga dealer atas kendaraan roda 4 atau lebih yang baru.

4. Yang dimaksud dengan jumlah kendaraan roda 2 yaitu jumlah kendaraan roda 2 yang domisili pemiliknya berada di wilayah otonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pajak atas kepemilikan kendaraan roda 2 yang dipungut oleh pemerintah daerah dan masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sumbangan pihak ketiga dealer atas kendaraan roda 2 yang baru.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu dana pemerintah daerah yang dialokasikan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui bagian labanya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini menggunakan data series tahun 1998 sampai dengan 2005.

Data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2005.
- b. Data Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2005.

- c. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2005.
- d. Data mengenai Transfer Pemerintah Pusat ke Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 - 2005.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 – 2005.
- c. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan data dan dinyatakan dalam bentuk uraian. Data ini merupakan data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada.

3.4.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least Square*), yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independent terhadap variabel dependen, maka model penelitian ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots \dots \dots (3.1)$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis diatas adalah bahwa penerimaan pemerintah daerah (Y) akan dipengaruhi oleh jumlah transfer pemerintah pusat (X1), jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (X2), jumlah kendaraan roda 2 (X3) dan jumlah investasi pemerintah daerah pada BUMD (X4).

Model penerimaan daerah dari variabel – variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i \dots \dots \dots (3.2)$$

Di mana :

Y = pendapatan asli daerah (rupiah)

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= parameter
X1	= jumlah transfer pemerintah pusat (rupiah)
X2	= jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (rupiah)
X3	= jumlah kendaraan bermotor roda 2 (rupiah)
X4	= jumlah investasi pemerintah pada BUMD (rupiah)
μ	= faktor gangguan (<i>disturbance error</i>)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : jumlah transfer pemerintah pusat, jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan jumlah investasi pemerintah pada BUMD, terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.

3.4.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas. Jika terjadi multikolinearitas sempurna maka penaksir OLS menjadi tidak tertentu dan varians atau kesalahan standarnya juga menjadi tidak tertentu (Gujarati dalam Sumarmo Zain, 1997 : 162). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- Nilai korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (biasanya diatas 0,90).

- c. Nilai Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,9 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran yang tidak sama atau tidak samanya varian sehingga uji signifikansi tidak valid. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan lain. Jika terjadi heteroskedastisitas maka penaksiran OLS tetap bias dan konsiten tetapi penaksiran tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas.

Lebih jauh lagi untuk menguji model regresi yang digunakan terdapat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Park*. (Gujarati, 2003 : 403 – 414).

3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain adalah variabel gangguan yang tidak *random*. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deretan waktu atau *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section* atau lintas sektoral) (Gujarati, 2003 : 442).

Faktor – faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model penggunaan lag pada model, tidak memasukkan variabel yang penting. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin Watson*.

3.4.5 Pengujian Hipotesis

Setelah dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik selanjutnya adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah semua variabel independennya memang secara bersama – sama mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Uji statistik adalah menguji apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan metode – metode statistik yang ada, meliputi :

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikansi masing – masing parameter dari variabel yang diukur (independent) terhadap variabel dependen secara terpisah (parsial), apakah dapat diterima secara statistik dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing – masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen maka digunakan uji t . Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Imam Ghozali, 2005 : 84) :

$H_0 : \beta_i = 0$ Tidak terdapat pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_i \neq 0$ Terdapat pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

- Apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima.
- Apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima.

Dengan angka signifikansi 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (*degree of freedom*)

$n - k = (35 - 4) = 31$, maka dapat diketahui nilai t tabel sebesar 1,696.

b. Dengan menggunakan angka signifikansi

- Apabila angka signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima.
- Apabila angka signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikansi secara bersama – sama parameter dari variabel yang diukur (independent) terhadap variabel dependen, apakah dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kaidah keputusan uji F statistik sebagai berikut :

- Jika F hitung $<$ F tabel, maka hipotesa ditolak
- Jika F hitung $>$ F tabel, maka hipotesa diterima. Artinya bahwa secara bersama – sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau terdapat hubungan yang signifikan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel – variabel independent terhadap variabel dependen. Kaidah keputusan R^2 adalah :

- Jika R^2 mendekati 0, maka diantara variabel independent dan variabel dependen tidak ada keterkaitan.
- Jika R^2 mendekati 1, maka diantara variabel independent dan variabel dependen ada keterkaitan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Keadaan APBD Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya dapat dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara maksimal dan optimal agar lebih mandiri dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah yang dicanangkan sejak tahun 2001, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki secara optimal agar dapat melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan melalui struktur APBD.

APBD merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan keputusan, peraturan atau pedoman menteri dalam negeri yang disesuaikan dengan rencana strategis daerah yang telah disusun agar pembangunan di daerah dapat sejalan dengan program pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Penyusunan APBD harus mengacu pada ketentuan yang ada dengan maksud agar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban serta pelaporan terhadap pelaksanaannya dapat dengan mudah dipantau serta dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan kedepan, oleh karena itu pelaksanaan APBD harus transparan dan akuntabel.

4.1.1. Perkembangan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun anggaran 2005 mengalami peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 20,01 % yaitu dari Rp.684.693,13 juta; pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp.3.526.839,40 juta pada tahun 2005. Dilihat dari pertumbuhannya APBD Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 1999 sebesar Rp.201.618,19 juta; tahun 2000 sebesar Rp.195.320,13 juta; tahun 2001 sebesar Rp.852521,89 juta; tahun 2002 sebesar Rp.455.608,45 juta; tahun 2003 sebesar Rp.510.465,32 juta; tahun 2004 sebesar Rp.202.807,51 juta; dan tahun 2005 sebesar Rp423.804,78 juta.

Meskipun pertumbuhan masing-masing tahun tidak sama, namun kecenderungannya selalu meningkat. Gambaran tentang perkembangan rata-rata pertumbuhan APBD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Pertumbuhan APBD Provinsi Jawa Tengah
(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun Anggaran	Jumlah APBD	Pertumbuhan (%)
1	1998	684,693.13	
2	1999	886,311.32	22.75
3	2000	1,081,631.45	18.06
4	2001	1,934,153.34	44.08
5	2002	2,389,761.79	19.07
6	2003	2,900,227.11	17.60
7	2004	3,103,034.62	6.54
8	2005	3,526,839.40	12.02
Rata-rata pertumbuhan		46.020.90	20.01

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

4.1.2. Kontribusi PAD terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, dan diharapkan selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini penting artinya apalagi setelah otonomi daerah diberlakukan, maka daerah harus mampu membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sendiri dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat membangun daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi maupun kondisi daerah itu sendiri dengan mengutamakan potensi unggulan daerah.

Adapun besarnya kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah APBD (Jutaan rupiah)	Jumlah PAD (Jutaan rupiah)	Kontribusi PAD (%)
1	1998	684,693.13	238.874,99	34.89
2	1999	886,311.32	318.566,66	35.94
3	2000	1,081,631.45	474.210,35	43.84
4	2001	1,934,153.34	830.974,15	42.96
5	2002	2,389,761.79	1.241.644,88	38.06
6	2003	2,900,227.11	1.467.004,57	50.58
7	2004	3,103,034.62	1.865.391,19	60.12
8	2005	3,526,839.40	2.490.643,74	70.62

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 8 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan 2005 kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 47.13 % atau sumber PAD mampu membiayai sebesar 47.13 % dari pelaksanaan APBD. Dilihat dari besaran prosentase kontribusi tersebut sebenarnya sudah cukup besar, tetapi apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa, kontribusi PAD provinsi jawa tengah masih kalah atau masih lebih rendah, sehingga untuk menjaga supaya disparitas pembangunan antar provinsi di pulau jawa tidak terlalu besar, maka jawa tengah harus mampu lebih meningkatkan PADnya untuk mengejar ketinggalan tersebut.

4.1.3. Kontribusi Transfer terhadap APBD

Transfer adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adapun kontribusi transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah
(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Jumlah APBD	Jumlah Transfer	Kontribusi Transfer (%)
1	1998	684,693.13	414,084.82	60.47
2	1999	886,311.32	578,522.04	65.27
3	2000	1,081,631.45	521,123.56	48.17
4	2001	1,934,153.34	875,304.11	45.25
5	2002	2,389,761.79	719,025.09	30.08
6	2003	2,900,227.11	985,407.97	33.97
7	2004	3,103,034.62	1,018,208.68	32.81
8	2005	3,526,839.40	1,036,195.65	29.38

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 8 tahun sejak tahun 1998 sampai dengan 2005 kontribusi Transfer terhadap APBD rata-rata sebesar 43,17 %. Dilihat dari besaran prosentase kontribusi tersebut menggambarkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah, provinsi jawa tengah masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 43,17 %. Transfer pemerintah pusat memang harus ada dan selalu ada, karena hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tetap adanya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat guna menghindari perpecahan daerah (*disintegrasi*) dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Apabila daerah diberi kebebasan untuk memanfaatkan potensi daerah secara

					PAD (%)	PAD (%)	PAD (%)
1	1998	238,874	61,128	78,657	25.59	32.93	58.52
2	1999	318,566	68,350	77,947	21.46	24.47	45.92
3	2000	474,210	64,914	86,790	13.69	18.30	31.99
4	2001	830,974	131,698	153,553	15.88	18.48	34.36
5	2002	1,241,645	164,462	206,532	13.25	16.63	29.88
6	2003	1,467,004	201,713	257,906	13.75	17.58	31.33
7	2004	1,865,391	280,037	346,719	15.01	18.59	33.60
8	2005	2,490,643	343,378	406,936	13.79	16.34	30.13

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

4.1.5. Kontribusi Hasil Penyertaan Modal (*Deviden*) terhadap PAD

Penyertaan modal provinsi jawa tengah merupakan investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ataupun swasta. Penyertaan modal ini diharapkan dapat membantu penerimaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Adapun kontribusi dari hasil penyertaan modal (*Deviden*) pemerintah provinsi jawa tengah dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5
Kontribusi Hasil Penyertaan Modal (*Deviden*) terhadap PAD
(Dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Hasil Penyertaan Modal (<i>Deviden</i>)	Kontribusi Penertaan Modal terhadap PAD (%)
1	1998	238,874	637	0.27
2	1999	318,566	1,762	0.55
3	2000	474,210	2,018	0.43
4	2001	830,974	2,682	0.32
5	2002	1,241,645	6,324	0.70
6	2003	1,467,004	9,191	0.63
7	2004	1,865,391	203,716	10.92
8	2005	2,490,643	92,243	3.70

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 dari tahun ketahun semakin membaik. Pertumbuhan sektor riil mengalami fluktuasi antar sektor. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah, kemudian sektor pertanian juga masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 periode 1998-2002 secara umum lebih rendah dibandingkan perkembangan produk regional bruto. Perkembangan produk domestik regional bruto tahun 1998-2002 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Jawa Tengah Tahun 1998-2005

Tahun	PDRB Jawa Tengah	Pertumbuhan
1997	43129838.90	-
1998	38065273.35	-11.74
1999	39362404.92	3.41
2000	40941667.00	4.01
2001	42305176.00	3.33
2002	43775693.00	3.48
2003	45557110.00	4.07
2004	47857780.00	5.05

Sumber : Jateng dalam Angka, 1998 – 2004

Naik turunnya PDRB menggambarkan kondisi perekonomian dari suatu daerah. Hal ini menyebabkan PDRB dijadikan salah satu acuan bagi para investor untuk memahami kondisi dari daerah yang dimaksud, dengan meningkatnya pendapatan daerah yang tercermin dalam PDRB maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal daerah seperti dalam teori akselerasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada bagian deskripsi objek penelitian dibahas secara deskriptif variabel – variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

5.1.1. Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan di dalam APBD terdiri dari lima komponen besar, yaitu : PAD; bagi hasil pajak dan bukan pajak; sumbangan/bantuan pemerintah pusat; pinjaman daerah; dan sisa lebih tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini faktor yang paling dominan mempengaruhi PAD adalah dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Pada tabel 4.1 dapat dilihat

pendapatan asli daerah cenderung meningkat setiap tahunnya, hanya pada tahun 2001 dan 2003 prosentase PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi secara nominal mengalami kenaikan. Adapun data pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Potensi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan
Dengan APBD Provinsi Jawa Tengah 1998 – 2005 (JutaRupiah)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Daerah	PAD	Persentase Kemandirian
1	1998	648.393	238.874	34,89 %
2	1999	946.237	318.566	35,94 %
3	2000	1.081.631	474.210	43,84 %
4	2001	1.934.153	830.974	42,96 %
5	2002	2.389.761	1.241.644	51,96 %
6	2003	2.900.227	1.467.004	50,58 %
7	2004	3.103.034	1.865.391	60,12 %
8	2005	3.526.839	2.490.643	70,62 %

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui potensi keuangan daerah setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, sehingga dapat menunjang kemandirian daerah.

5.2. Pengujian Hipotesis

Tabel 5.2
Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	25,4399	3,601	0,037
Tranfer	2,440	3,659	0,006
Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih	2,859	3,535	0,009
Jumlah kendaraan roda 2	0,505	4,140	0,003
Investasi Daerah	1,350	4,595	0,001

Sumber : Data Sekunder Hasil Pengolahan SPSS 11.5, 2007

5.2.1. Pengujian Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing – masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen maka digunakan uji t. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Imam Ghozali, 2005 : 84) :

$H_0 : \beta_i = 0$ Tidak terdapat pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_i \neq 0$ Terdapat pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel
 - Apabila t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima.

- Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima.

Dengan angka signifikansi 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (*degree of freedom*) $n - k = (8 - 4) = 4$, maka dapat diketahui nilai t tabel sebesar 2,132.

b. Dengan menggunakan angka signifikansi

- Apabila angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

5.2.1.1. Variabel Transfer (X_1)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel transfer (X_1) menunjukkan t hitung sebesar 2,440 ($2,440 > 2,132$) dengan angka signifikansi sebesar 0,006 ($0,006 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel transfer secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah transfer akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2.1.2. Variabel Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih (X_2)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih (X_2) menunjukkan t hitung sebesar 3,535 ($3,535 > 2,132$) dengan angka signifikansi sebesar 0,009 ($0,009 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4

atau lebih meningkat akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2.1.3. Variabel Jumlah Kendaraan Roda 2 (X_3)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel jumlah kendaraan roda 2 (X_3) menunjukkan t hitung sebesar 4,140 ($4,140 > 2,132$) dengan angka signifikansi sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 2 secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 2 meningkat akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2.1.2. Variabel Investasi Daerah (X_4)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel investasi daerah (X_5) menunjukkan t hitung sebesar 4,595 ($4,595 > 2,132$) dengan angka signifikansi sebesar 0,001 ($0,001 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi daerah signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi investasi maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.3. Pengujian Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2005 : 84). Hipotesa yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

a. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

- Apabila F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima
- Apabila F hitung < F tabel, maka H_0 diterima

Dengan tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (*degree of freedom*) $n - k - 1 = (8 - 4 - 1) = 3$ maka dapat diketahui nilai F tabel sebesar 9,12.

b. Dengan menggunakan angka signifikansi

- Apabila angka signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima.
- Apabila angka signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Hasil output regresi menunjukkan nilai F hitung sebesar 23,468 ($23,468 > 9,12$) dengan angka signifikansi sebesar 0,013 ($0,013 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah secara bersama –

sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah.

5.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghozali, 2005 : 83). Berdasarkan perhitungan diperoleh sebagai berikut

Tabel 5.3
Koefisien Diterminasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984 ^a	.969	.928	.230128	2.006

- a. Predictors: (Constant), Investasi Daerah, Jumlah Kendaraan Roda 2, Transfer, Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih
b. Dependent Variable: PAD

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dinyatakan dalam Adjusted R^2 sebesar 0,928 atau sebesar 92,8 persen. Hal ini berarti sebesar 92,8 persen variasi yang terjadi pada variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah. Dengan demikian masih terdapat sebesar 100 persen – 92,8 persen = 7,2 persen yang merupakan kontribusi variabel bebas lain diluar keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah

5.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 11.5 maka di dapat persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 5.4
Hasil Regresi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.439	7.064		3.601	.037		
	Transfer	2.460	.672	.177	3.659	.006	.814	1.228
	Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih	2.859	.809	.548	3.535	.009	.755	1.325
	Jumlah Kendaraan Roda 2	.505	.122	.120	4.140	.003	.934	1.070
	Investasi Daerah	1.350	.294	.125	4.595	.001	.923	1.083

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel di atas kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi

$$Y = 25,439 + 2,440 X_1 + 2,859 X_2 + 0,505 X_3 + 1,350 X_4$$

Dari persamaan di atas diketahui bahwa :

- Transfer (X_1)

Koefisien regresi sebesar 2,440 menunjukkan bahwa variabel transfer berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi transfer, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 juta untuk transfer, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,440 juta.

- Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih (X_2)

Koefisien regresi sebesar 2,859 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah

di Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,859 juta.

- Jumlah Kendaraan Roda 2 (X_3)

Koefisien regresi sebesar 0,505 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 2 signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah kendaraan roda 2, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 2, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,505 juta.

- Investasi Daerah (X_4)

Koefisien regresi sebesar 1,350 menunjukkan bahwa variabel investasi daerah signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi investasi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya deviden yang masuk ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 juta untuk investasi daerah, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,350 juta.

5.6 Pembahasan

a. Pengaruh Variabel Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hasil signifikan secara tidak langsung, khususnya transfer yang digunakan untuk membiayai pembangunan infra struktur dan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong kegiatan perkonomian di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan PAD. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,659 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat signifikan secara tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah menyebabkan tingkat kemandirian daerah semakin baik, karena semakin tinggi PAD, transfer yang dialokasikan dalam APBD semakin kecil dibandingkan dengan PAD.

b. Pengaruh Variabel Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah kendaraan roda 4 atau lebih terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang signifikan, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 dan 2005 membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dari luar Provinsi Jawa Tengah, sehingga masyarakat di Jawa Tengah bergairah membeli kendaraan luar jawa tengah yang harga pasarannya lebih rendah untuk dimutasikan ke Jawa Tengah. Walaupun BBNKB II dari kendaraan luar daerah

nihil, tetapi pajak kendaranya masuk ke kas daerah provinsi Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,535 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah.. Jadi dapat dikatakan jika semakin banyak jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang ada di Jawa Tengah, maka pendapatan asli yang diperoleh Propinsi Jawa Tengah akan semakin besar, karena pajak kendaraan bermotor roda 4 yang disetor ke kas daerah semakin besar.

c. Pengaruh Variabel Jumlah Kendaraan Roda 2.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah kendaraan roda 2 terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,140 dan Angka probabilitas signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 2 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Hal ini yang menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaran roda 2 akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Jadi dapat dikatakan jika semakin banyak jumlah kendaran roda 2 yang ada di Jawa Tengah, maka pendapatan asli yang diperoleh Propinsi Jawa Tengah akan semakin besar, hal ini juga disebabkan karena adanya kebijakan

pembebasan BBNKB II dari luar Jawa Tengah, sehingga pajak kendaraan bermotor roda 2 yang disetor ke kas daerah semakin besar.

d. Pengaruh Variabel Investasi Daerah.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara investasi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,595 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Hal ini yang menjelaskan bahwa semakin tinggi investasi daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah atau dapat dikatakan jika semakin banyak investasi daerah yang dialokasikan dari APBD, maka pendapatan asli yang diperoleh Propinsi Jawa Tengah akan semakin besar, karena deviden dari hasil investasi daerah yang disetor ke kas daerah semakin besar.

BAB VI

PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Simpulan merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi sebesar 2,859 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari

0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 4 atau lebih maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,859 juta.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda 2 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi sebesar 0,505 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 2 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 2 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 2, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 2 maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,505 juta.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi sebesar 1,350 menunjukkan bahwa variabel investasi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi

Jawa Tengah, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi investasi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 juta investasi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,350 juta.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna meningkatkan PAD, yaitu :

1. Pemerintah daerah agar berusaha untuk mendapatkan bagi hasil dari pusat terkait sumberdaya daerah yang peenerimaannya disetor seluruhnya ke pusat, sebagai contoh bagi hasil cukai yang semuanya merupakan penerimaan pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah agar mempertahankan kebijakan yang telah ditempuh yaitu pembebasan BBNKB II yang berlaku selamanya tidak temporer, sehingga kendaraan dari luar Jawa Tengah yang mutasi ke Jawa Tengah semakin meningkat.
3. Membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor khususnya kendaraan bekas, sehingga semua kendaraan terdaftar dengan baik dan masyarakat bergairah untuk miliki kendaraan bermotor yang harganya terjangkau walaupun bekas, sehingga dengan meningkatnya

pemilik kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, dan dengan demikian PAD juga akan meningkat.

4. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, atau menambah jumlah outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memanfaatkan jasa perbankan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Dengan banyaknya outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat secara efektif dapat diterima oleh kas daerah.
6. Melaksanakan investasi pada usaha-usaha yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan berpartisipasi pada mega proyek yang ada di daerahnya sehingga dapat menambah penerimaan daerah.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami oleh penulis, keterbatasan – keterbatasan yang dialami penulis adalah :

1. Referensi dari penelitian sebelumnya tidak banyak, sehingga acuan dari penelitian ini mendasarkan pada laporan keuangan yang ada.
2. Pengukuran tingkat kemandirian daerah belum ada aturan yang baku, sehingga diasumsikan dengan tingkat kemandirian yang diukur dari prosentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan APBD.

3. Keterbatasan dari data yang diperoleh, seperti data dan literatur yang menjelaskan tolok ukur kemandirian daerah belum ada.
4. Pemerintah pusat tidak mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah, sehingga data maupun informasi mengenai tingkat kemandirian daerah hanyalah asumsi belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia", **JEBI Vol. 16, No. 4, 2001.**
- Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", **PRISMA, No. 4, 1985.**
- Badan Pusat Statistik, **Pendapatan Regional .Jawa Tengah Tahun 1999 s/d 2003**, Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, "**Jawa Tengah Dalam Angka, Tahun 1999 s/d 2003.** Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Tengah
- Booth, Anne., "Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah", **PRISMA nomor 1 Januari 1988, hlm. 65-78.**
- Davey K.J, 1988, **Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga**", Penerbit UI-Press.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, "**Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab**, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk, 1989, "**Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**", Penerbit UI-Press.

- Diah Lutfi Wijayanti, 2001 "Sektor-Sektor Ekonomi Potensial dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah : DIY", **Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta** (tidak dipublikasikan).
- Dumairy, 1991, "**Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi**", BPFE Yogyakarta.
- Firmansyah, 2001, **Modul Pelatihan Praktis Ekonometrika, Aplikasi Econometric Views 3.0**, LSKE FE UNDIP.
- Gujarati, D. **Ekonometrika Dasar**, Terjemahan Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Guritno Mangkoesoebroto, 2001, **Ekonomi Publik**, BPFE Yogyakarta.
- Hadi Sasana, 2001, "Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten", **Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta** (tidak dipublikasikan).
- Herman Haeruman Js, "Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah", **25 Tahun PRISMA 1971-1996**.
- H. Miyasto, "Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah", **Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 2 (4) Oktober 1998**.
- Imam Ghozali, 2001. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jaya WK, 1996, **"Analisa Keuangan Daerah : Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM.**
- Kaho, 1997, **"Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia"**, cetakan keempat Rajawali Press, Jakarta.
- LP2I Semarang dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2000, **"Penyusunan Data Potensi Dan Kemandirian Daerah-Daerah Propinsi Jawa Tengah"**.
- Mardiasmo, 2002, **" Otonomi Daera Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah"**
- Miller, SM dan Russek, FS, "Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level", **Public Finance Review, Vol. 25 No. 2, March 1997, 213-237, Sage Publications, Inc.**
- "Modul : Latihan Ekonometrika Dasar"**, Program Magister Sains, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2001.
- Mudradjat Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan", **PRISMA, nomor 4, 1995, Jakarta.**
- Mudradjat Kuncoro, 1997, **"Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.**

- Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nota Perhitungan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggran 1998 s/d 2005.**
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, **"REPETADA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002"**.
- Radianto, "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku", **PRISMA nomor 3, 1997.**
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.**
-, **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**
-, **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
-, **Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.**
- Richard, L.H.Tumilar, 1997, **"Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara"**, Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Rita Engleni, **"Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang"**, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2001.
- Sadono Sukirno, **1994, Pengantar Teori Makroekonomi**, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1999, **Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suhasil Nazara, "Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia", **PRISMA**, **3 Maret 1997**.
- Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", **Media Ekonomi dan Bisnis**, Vol. XII, No. 1 Juni 2000.
- Suparmoko, 2002, **"Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah"**, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suparmoko, 1994, **Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek**, BPFY Yogyakarta.
- Susiyati B. Hirawan, 1987, **"Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional : Keuangan Daerah di Indonesia"**, Badan Otonom

Economica bekerja sama dengan LPFE-UI
Jakarta.

